



ETNOREFLIKA

JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
 JURUSAN ANTROPOLOGI
 FAKULTAS ILMU BUDAYA
 UNIVERSITAS HALU OLEO
 Volume 5, Nomor 1, Februari 2016



Akulturasi Budaya pada Bentuk
 Atap Masjid di Kabupaten Konawe
 Selatan Sulawesi Tenggara

Transformasi Struktur Lima pada
 Masyarakat Buton (Aplikasi Transformasi
 Levi-Strauss)

Model Penanganan Konflik Sosial di
 Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
 Provinsi Sulawesi Tenggara

Penguatan Kelompok Kerja Pembangunan Desa
 (K2PD) terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam
 Berperspektif Gender di Kecamatan Anggaberu
 Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara

Dukungan Modal Sosial dan Modal Budaya
 pada Kesehatan Ibu dan Anak di Desa
 Temoran Kabupaten Sampang
 Provinsi Jawa Timur

Peranan Sastra Anak untuk Membangun
 Integritas Anak Bangsa

Perspektif Wacana dan
 Analisisnya

Nilai - Nilai Tuturan Ewa Wuna pada
 Masyarakat Muna

Stereotip Antar Etnis Dalam
 Disintegrasi Sosial di Kota Kendari

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat-Nya, segala yang kita lakukan dengan kerja keras dapat terlaksana dengan baik. Jurnal Etnoreflika Volume 5 Nomor 1, Februari 2016 telah terbit dengan menyajikan 9 (Sembilan) tulisan dari berbagai disiplin ilmu social dan budaya. Jurnal Etnoreflika Volume 5 Nomor 1, Februari 2016, memuat tulisan sebagai berikut:

- Akulturasi Budaya pada Bentuk Atap Mesjid di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
- Transformasi Lima pada Masyarakat Buton (Aplikasi Transformasi Levi-Strauss)
- Model Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
- Penguatan Kelompok Kerja Pembangunan Desa (K2PD) terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Berperspektif Gender di Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
- Dukungan Modal Sosial dan Modal Budaya pada Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Temoran Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur
- Peranan Sastra Anak untuk Membangun Integritas Anak Bangsa
- Perspektif Wacana dan Analisisnya
- Nilai-nilai Tuturan *Ewa Wuna* pada Masyarakat Muna
- Stereotip antar Etnis dalam Disintegrasi Sosial di Kota Kendari

Salam Redaksi

DAFTAR ISI

Muhammad Zakaria Umar Muhammad Arsyad	1 - 14	Akulturası Budaya pada Bentuk Atap Mesjid di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
Muarifuddin	15 - 25	Transformasi Lima pada Masyarakat Buton (Aplikasi Transformasi Levi-Strauss)
Nasruddin Suyuti La Ode Aris	26 - 38	Model Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
Laxmi La Ode Syukur	39 - 44	Penguatan Kelompok Kerja Pembangunan Desa (K2PD) terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Berperspektif Gender di Kecamatan Anggaberı Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
Ajeng Kusuma Wardhani	45 - 53	Dukungan Modal Sosial dan Modal Budaya pada Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Temoran Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur
Faika Burhan	54 - 61	Peranan Sastra Anak untuk Membangun Integritas Anak Bangsa
Agus Supriatma	62 - 67	Perspektif Wacana dan Analisisnya
Arman	68 - 80	Nilai-nilai Tuturan <i>Ewa Wuna</i> pada Masyarakat Muna
La Iba	81 - 93	Stereotip antar Etnis dalam Disintegrasi Sosial di Kota Kendari

**MODEL PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN KATOBU
KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA¹***Nasruddin Suyuti²**La Ode Aris³***ABSTRAK**

Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan judul analisis konflik sosial pada masyarakat Muna ini dilaksanakan di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik sosial di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, dan untuk mengetahui bagaimana model penanganan konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Katobu. Penelitian ini dilaksanakan selama dua tahun. Tahun pertama yaitu 2015 telah dilaksanakan. Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik sosial di Kabupaten Muna adalah konsumsi minum-minuman keras, terjadinya kesalahpahaman antara pemuda, aksi kekerasan yang direncanakan, dan konflik kepentingan. Sementara pada tahun kedua 2016 dirumuskan model penanganan konflik sosial di Kabupaten Muna. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data di lapangan digunakan beberapa teknik yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan konflik sosial di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna adalah melalui peningkatan keterampilan pemuda, pembukaan lapangan kerja baru, dan peningkatan komunikasi yang intensif antar masyarakat. Sementara model penanganan konflik setelah dilakukan penelitian yang mendalam maka perlu adanya sosialisasi kepada pemerintah tentang temuan dilapangan terkait dengan adanya kemungkinan konflik sosial dapat terjadi, setelah itu ditingkatkan pemerintah daerah perlu membuat kebijakan untuk melaksanakan beberapa temuan lapangan, sehingga dengan demikian konflik sosial dapat diminimalisir bahkan dihilangkan.

Kata kunci: model, penanganan, konflik, sosial

ABSTRACT

This article is the result of research with the title “analysis of social conflict in Muna society implemented in Katobu District Muna Regency”. Objective of this study was to determine the cause of social conflict in the Katobu District Muna Regency, and to know how to make a model of handling of social conflicts that occurred in the Katobu District, The study was planned for two years. The first year was 2015 had been implemented. The results of the first year of research showed that the cause of social conflict in Muna is the consumption of alcohol, misunderstanding between youths, planned violence, and conflict of interest. While the second year is 2016, the writer is trying to create a model format on handling social conflicts in Muna. This research method used in this study is a qualitative research method. To get the field data, the techniques used were techniques of observation, interviews, and documentation. While the source of the data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly on

¹Hasil Penelitian

²Guru Besar Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. BTN. Saranani III Blok C. No.1. Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Pos-el:nasrun_26@yahoo.com

³Staf Pendidik pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo Kendari, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: laodearis@yahoo.co.id

the object of study or directly to the public, while secondary data is data obtained from documents or previous research results. These results indicate that the handling of social conflicts in Katobu District Muna Regency is through improving the skills of youth, opening of new jobs, and increase the intensive communication between communities. While the model of conflict resolution after extensive research it is necessary to disseminate to the government about the findings of the field in accordance with the possibility of social conflict that can be occurred, after that government should make policies to implement some of the findings from the field, so that social conflict can be minimized or even eliminated.

Keywords: *models, handling, conflict, social*

A. PENDAHULUAN

Konflik yang berkepanjangan yang melanda bangsa Indonesia menyisahkan luka dalam bagi bangsa ini. Korban harta dan nyawa manusia terjadi dimana-mana. Tekanan psikologis bagi keluarga yang ditinggalkan masih terasa sampai kini. Hal ini disebabkan oleh mudarnya moral bangsa, nilai penghargaan terhadap sesama semakin terkikis dan yang ada hanyalah persaingan untuk mendapatkan harta, jabatan dan kedudukan.

Begitupun juga di Sulawesi Tenggara, konflik kepentingan yang melanda daerah ini telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Beberapa konflik yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara merupakan contoh nyata mudarnya nilai-nilai moral tersebut. Konflik yang terjadi di Kabupaten Kolaka dan Kota Bau-bau penolakan masyarakat atas operasi perusahaan tambang nikel di kawasan mereka. Hal tersebut merupakan tuntutan tertinggi masyarakat, meskipun pada dasarnya mereka dapat mentolerir operasi perusahaan sejauh izin yang diberikan tidak tumpang tindih dengan lahan yang menjadi hak kelola masyarakat (Suyuti 2013).

Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Muna yang melibatkan pemuda antar lorong menambah deret panjang konflik sosial di Sulawesi Tenggara. Konflik sosial di Kabupaten Muna yang didalangi oleh pemuda antar lorong ini telah menghancurkan persahabatan, teman,

terlebih lagi telah menghancurkan hubungan kekeluargaan diantara mereka. Konflik sosial yang berlangsung dalam kurun waktu 2011 sampai 2012 itu juga meninggalkan korban harta, nyawa, serta kerusakan sarana dan prasarana yang tidak sedikit. Tekanan psikologis pun masih membayangi warga di wilayah konflik sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan.

Selama ini Kabupaten Muna dikenal dengan intensitas politik yang sangat tinggi tetapi konflik sosial dapat diminimalisir. Namun, justru konflik yang melibatkan pemuda antar lorong begitu mudah memicu terjadinya konflik.

Beberapa teori yang dapat dijadikan rujukan untuk menganalisis konflik yang terjadi di Kecamatan Katobu yaitu Miall (2000: 7-8) mengatakan bahwa konflik sebagai aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindari dalam proses perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.

Sementara menurut Fisher (2001: 4) konflik dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Menurut Ritzer (2003), bahwa ketidakmerataan distribusi kekuasaan dan wewenang akan menempatkan masyarakat pada posisi yang berbeda yang pada

pada posisi yang berbeda yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Definisi konflik sosial menurut Coser (1967) dalam Oberschall (1978) adalah sebagai berikut: “*social conflict is a struggle over values or claims to status, power, and scarce resources, in which the aims of the conflict groups are not only to gain the desired values, but also to neutralise, injure, or eliminate rivals*”. Mengacu pada pengertian konseptual tentang konflik sosial di atas, maka proses konflik sosial akan meliputi spektrum yang lebar.

Menurut Dharmawan (2006:2) bahwa konflik sosial bisa berlangsung pada arah antar ruang kekuasaan. Sementara menurut Bebbington (1997) dan Luckham (1998) terdapat tiga ruang kekuasaan yang dikenal dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan, yaitu ruang kekuasaan negara, masyarakat sipil atau kolektivitas sosial, dan sektor swasta. Konflik sosial bisa berlangsung di dalam setiap ruangan ataupun melibatkan agensi atau struktur antar ruangan kekuasaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasruddin, dkk (2013) di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara mengindikasikan bahwa konflik sosial yang melibatkan pihak pemerintah dengan masyarakat setempat mengenai peletakan atau penentuan daerah Ibu Kota Kabupaten. Sesuai dengan SK menteri dalam negeri bahwa Ibu Kota Kabupaten Buton Utara adalah di Ereke, tetapi pemerintah setempat menempatkan Ibu Kota Kabupaten di Buranga. Dengan kebijakan seperti ini menuai berbagai macam protes dari lembaga kemasyarakatan dan masyarakat setempat. Sampai saat ini (2015) belum ada solusi masalah yang menyelesaikan konflik tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Kecamatan Katobu merupakan wilayah Ibu Kota Kabupaten Muna yang sejak tahun 2011-2012 dilanda konflik yang banyak menelan korban baik itu nyawa manusia, maupun harta benda. Lokasi ini dipilih karena selama kurun waktu itu intensitas konflik lebih tinggi bila dibandingkan dengan kecamatan yang lain yang berada di wilayah ibu kota Kabupaten Muna.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari obyek penelitiannya atau dari masyarakat di mana konflik terjadi. Data primer atau data asli atau data baru yang mempunyai sifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung dari kejadian konflik yang ada. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, wawancara serta penyebaran pedoman wawancara.

Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari dokumen-dokumen yang telah ada. Data sekunder bisa diperoleh dari berbagai sumber misalnya biro pusat statistik (BPS), jurnal, buku, laporan dan lain sebagainya.

Ada beberapa macam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*) dan teknik dokumentasi. Teknik pengamatan digunakan untuk mengamati secara langsung fasilitas yang dirusak oleh pihak-pihak yang bertikai ketika konflik sosial terjadi di Kecamatan Katobu. Berbagai fasilitas yang dirusak seperti perumahan warga dan fasilitas umum. Hal ini dilakukan untuk mendukung pernyataan informan terkait dengan konflik sosial yang berlangsung beberapa tahun terakhir.

Dalam penelitian ini dipakai dua jenis informan yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci ditetapkan langsung berasal dari tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah setempat (camat, lurah yang ada di Kecamatan Katobu, PolPP), pihak Kepolisian, dan TNI. Sementara informan biasa berasal dari masyarakat umum yang berdomisili di wilayah konflik.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif berupa deskripsi yang mendalam terkait dengan konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Katobu. Penelitian ini berusaha mengungkap penyebab kejadian konflik sosial dan upaya penanganannya dari berbagai pihak. Untuk itu digunakan teknik analisis kualitatif etnografi (Endraswara 2003: 242). Melalui teknik ini secara etnografi dideskripsikan mengenai konflik sosial yang terjadi selama kurun waktu 2011-2012 secara holistik atau menyeluruh dan mendalam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Konflik di Kecamatan Katobu

Konflik antar kelompok yang terjadi di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara telah meresahkan warga yang ada di sekitarnya. Konflik ini telah berlangsung lama dan menimbulkan dendam berkepanjangan yang sewaktu-waktu dapat mecuat kembali apabila sengaja dipicu oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Konflik yang terjadi di Kabupaten Muna tergolong unik, tidak sama dengan konflik yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia seperti di Ambon, Sambas, dan lokasi lainnya yang ada di Indonesia. Konflik yang terjadi di Indonesia pada umumnya selalu ditumpangi oleh isu 'sara' yaitu suku, agama dan ras, tetapi konflik yang terjadi di Kabupaten Muna dilatarbelakangi oleh

isu 'komunitas'. Mereka yang bertikai tidak memperhatikan latar belakang asal-usul 'sara' tetapi berdasarkan pada semangat komunitas, walaupun yang bertikai merupakan pertalian keluarga dekat tetapi kalau berasal dari komunitas yang berbeda tetap dianggap sebagai lawan.

Ini merupakan sebuah fakta konflik yang berlangsung di Kabupaten Muna selama kurun waktu 2011-2012 yang lalu, yang banyak melibatkan banyak unsur dalam masyarakat untuk menangani konflik komunitas ini. Konflik komunitas yaitu konflik yang berdasarkan pada isu kewilayahan tanpa memandang latar belakang 'sara'.

Dalam literatur antropologi komunitas adalah sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah yang berdasarkan pada ikatan kewilayahan (Koetjaraningrat 1985). Jadi, jika melihat tipe konflik yang terjadi di Kabupaten Muna adalah sentimen kewilayahan. Sebagai contoh lorong empang yang dihuni oleh beberapa suku bangsa yaitu Muna sebagai warga mayoritas, Bugis, Makassar, Baruta, dan Buton, menyerang komunitas warga di Lorong Palangga yang notabene berlatar suku bangsa juga beragam. Kedua komunitas ini telah berkonflik atau bertikai sejak lama. Dalam konflik antar pemuda ini tidak memperhatikan asal usul mereka, dengan kata lain konflik berdasarkan semangat kewilayahan atau semangat komunitas.

Konflik antar komunitas ini berlangsung di wilayah perkotaan yaitu di pusat pemerintahan dan pusat perekonomian Kabupaten Muna. Adapun komunitas atau wilayah-wilayah yang bertikai adalah:

1. Warga di Lorong Empang berkonflik dengan komunitas warga di Lorong Palangga;
2. Warga di lorong Rambutan yang bergabung dengan warga Jalan S. Goldaria berkonflik dengan kelompok warga di Lorong Pendidikan;

3. Warga di Jalan Kaendea yang dibantu oleh warga di Jalan S. Goldaria dan Lorong Rambutan berkonflik dengan kelompok warga di Jalan Sukowati yang dibantu oleh warga di lorong Pendidikan;
4. Warga di Lorong Wapunto berkonflik dengan warga di Lorong Palangga;
5. Warga di Jalan Dewi Sartika melawan kelompok warga di Jalan Abdul Kudus;
6. Warga Jalan Lampogu melawan Jalan Wamponiki dan
7. Warga di Jalan Waara berkonflik dengan warga di Jalan Banggai.

Dalam proses konflik selanjutnya kelompok warga di Lorong Pendidikan yang bersekutu dengan warga di Jalan Sukowati berkonflik dengan hampir semua komunitas yang ada di wilayah perkotaan. Pengaruh kelompok warga dari Lorong Pendidikan dalam proses ini sangat besar, karena hampir semua konflik antar komunitas warga yang ada di wilayah perkotaan terdapat campur tangan kelompok warga dari Lorong Pendidikan. Komunitas-komunitas ini berada dalam wilayah Kecamatan Katobu yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Muna. Sementara itu, Wapunto, Banggai, dan Waara berada di luar pusat pemerintahan.

Konflik antar komunitas itu memuncak ketika Bupati Ridwan Bae, turun dari jabatannya pada tahun 2011. Pada saat menjabat sebagai Bupati Muna Ridwan Bae mampu mengakomodir berbagai kepentingan termasuk kepentingan kelompok 'preman'. Pada masa pemerintahannya "preman" mendapat tempat yang layak bahkan turut serta dalam mempengaruhi berbagai kebijakan di Kabupaten Muna.

Pada pemerintahan ini 'preman' dapat dijadikan sebagai tokoh sentral, sehingga dalam setiap kebijakan yang diturunkan dapat dikawal oleh preman, dan hampir setiap kebijakan yang

diputuskan oleh Bupati Muna pada saat itu hampir semuanya berhasil. Misalnya, kasus "Kontu berdarah" ini dianggap merupakan salah satu *setting-an* Bupati yang melibatkan preman dan sampai saat ini belum berhasil diselesaikan (2015). Dalam kasus ini banyak menelan korban, baik harta benda, nyawa, menimbulkan dendam sosial, dan sampai meninggalkan tekanan psikologis bagi warga yang ada di wilayah Kontu.

Kini kekuasaan Ridwan Bae sebagai Bupati Muna berakhir, dan digantikan oleh Bupati yang baru sebagai kekuatan baru. Bupati menjadi pemenang pilkada tahunan 2011 adalah dr. Baharuddin yang diusung oleh gabungan partai yang didalamnya termasuk Partai Amanat Nasional (PAN). PAN merupakan partai yang berkuasa di Sulawesi Tenggara dan mengalahkan Partai Golkar. Dibawah pemerintahannya sistem dan kebijakan pemerintahan di Kabupaten Muna relatif berubah, yang membawa perubahan pula di seluruh elemen masyarakat yang juga turut berbenah.

Dalam masa pemerintahan dr. Baharuddin, hampir semua pejabat yang dekat dengan bupati sebelumnya dimutasi bahkan tidak diberikan jabatan, para pengusaha yang dekat dengan Ridwan tidak difungsikan dan pengaruh 'preman' dalam pemerintahan juga dihapuskan. Hal ini merupakan sebuah babak baru dalam kepemimpinan Bupati saat ini atau sebuah terobosan yang berani menanggung semua resiko yang mungkin terjadi tanpa memikirkan dampak negatif yang akan melanda daerah saat ini. Pejabat yang dimutasi tanpa alasan tentunya tidak menerima begitu saja. Demikian pula para pengusaha yang gulung tikar juga tentunya tidak berpangku tangan saja. Di sisi lain, upaya penghapusan preman tanpa alasan juga tidak serta merta menerima kebijakan ini. Keadaan tersebut secara tersamar memicu munculnya gerakan yang apik atau halus melalui *setting-an* konflik. Kendati demikian

setting-an tersebut bersifat laten sehingga tidak akan ada yang sadar jika hal tersebut disebabkan oleh kondisi-kondisi tersebut di atas.

Konflik tersebut menyebabkan suasana wilayah perkotaan menjadi mencekam, kondisi keamanan warga tidak terjamin, dan ditambah lagi aktivitas ekonomi masyarakat hanya berjalan di siang hari, sedangkan pada malam hari sama sekali tidak ada aktivitas, karena suasana kota yang nyaris seperti kota mati.

Saat terjadi konflik, biasanya jika dua komunitas mulai saling menyerang maka antar komunitas di tempat lain juga akan saling menyerang. Untuk menghentikan pertikaian tersebut biasanya pihak kepolisian setempat yang bekerjasama dengan TNI mengambil sikap tegas, yakni melakukan patroli pada malam hari dan mengeluarkan instruksi kepada seluruh aparat untuk menangkap siapa saja yang berada di jalan raya pada malam hari yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Dengan instruksi seperti ini akhirnya konflik di Kabupaten Muna untuk sementara dapat dikendalikan oleh pihak berwajib. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial di Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:

a. Konsumsi Minuman keras

Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras di kalangan pemuda di Kabupaten Muna merupakan salah satu pemicu munculnya berbagai permasalahan sosial yang menjadi muara timbulnya konflik antar komunitas di Kecamatan Katobu. Dalam pergaulan sehari-hari, mereka kadang tidak dapat membedakan hal yang berguna dan tidak berguna bagi diri, maupun lingkungan sosialnya. Konsumsi minuman keras tampaknya juga telah menjadi semacam kegemaran yang sukar ditinggalkan oleh kalangan pemuda di daerah ini. Mereka menjadi terbiasa, selain karena ajakan teman, juga karena tidak memiliki

pekerjaan tetap, serta terbatasnya keterampilan individu. Hal tersebut membuat mereka memiliki banyak waktu luang. Namun demikian, tidak dimanfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kaum pemuda di wilayah ini biasanya akan mengajak satu sama lain untuk “pesta miras”. Aktivitas tersebut biasanya berlanjut dengan memalak orang lain yang kebetulan lewat di sekitar mereka. Mereka meminta uang untuk membeli minuman keras, dan jika tidak diindahkan, maka mereka akan memukul atau bahkan menusuk dengan pisau (*badik*) orang yang dipalak tersebut.

Orang yang dipalak, pun terkadang menunjukkan sikap perlawanan dan tidak menerima diperlakukan demikian. Korban biasanya akan langsung melaporkan kepada keluarganya atau rekan-rekannya yang lain untuk melakukan aksi balas dendam, sehingga terpiculah perkelahian dan selanjutnya timbul tawuran antar pemuda. Pihak yang kalah akan mengajak rekan-rekannya yang lain untuk membantunya. Atas nama kebersamaan dan jalinan pertemanan, maka ia selanjutnya memperoleh bantuan tersebut. Pada kesempatan berikutnya, mereka akan melakukan penyerangan terhadap kelompok yang dianggap menang tadi sebagai bentuk pembalasan. Tindakan tersebut selanjutnya memicu tindakan serupa yang terjadi berulang-ulang kali.

Dengan mengkonsumsi minuman keras tersebut pula dapat memicu munculnya berbagai dampak negatif bagi lingkungan masyarakat, seperti terjadinya pembajakan pada tukang ojek, pembunuhan, pemerkosaan dan aksi kekerasan lainnya.

Berawal dari kasus-kasus sebagaimana dipaparkan di atas, menyebabkan dampak negatif lanjutan. Banyak individu yang terpaksa harus memutuskan hubungan kekeluargaan dengan seseorang yang berseberangan atau bertikai dengannya. Satu sama lain tidak lagi saling mengunjungi bahkan sampai saat ini masih menyimpan dendam.

Dendam ini pula yang selanjutnya menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik sering berulang. Jika ada pemicu konflik terulang kembali, demikian seterusnya sampai kasus-kasus seperti ini sangat sulit untuk diselesaikan dalam jangka waktu pendek.

Konflik yang terjadi di Kabupaten Muna memang tidak berlatar keluarga, melainkan komunitas. Namun demikian, pada akhirnya berakibat pada permusuhan antara keluarga. Dalam pertikaian antara komunitas di Kecamatan Katobu tidak memandang yang bertikai itu masih ada hubungan kekerabatan, agama atau semacamnya. Misalnya, konflik antara kelompok pemuda di Lorong Empang Kelurahan Raha 1 Dengan Kelurahan Palangga. Kedua pihak yang bertikai masih memiliki hubungan kekerabatan. Namun demikian, hal tersebut tidak membuat konflik dapat mereda. Konflik tetap terjadi atas nama solidaritas komunitas.

Selanjutnya, konflik yang berlangsung antar komunitas selanjutnya berkembang menjadi konflik gabungan antar komunitas. Dalam situasi ini tersebut, di jalan-jalan kota bermunculan oknum-oknum warga yang melakukan tindakan anarkis. Dalam melakukan aksinya mereka menggunakan topeng. Biasanya mereka mengendarai 5 – 10 sepeda motor. Mereka menyusuri jalan utama Kota Raha, dan jika menemukan warga di jalan langsung ditebas dengan parang. Pada masa itu, banyak korban luka bahkan sampai pada menelan korban jiwa. Konvoi sepeda motor seperti ini mereka lakukan hampir tiap malam, sehingga warga takut untuk keluar rumah pada malam hari. Kon-disi yang demikian menjadikan Kota Raha pada malam hari bagaikan kota mati yang tidak berpenghuni.

b. Kesalahpahaman antar Pemuda Memicu Terjadinya Kekerasan Massal

Salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan adalah adanya kesalahpahaman antar pemuda. Kesalahpahaman tersebut berujung pada penganiayaan dan kekerasan massal. Kesalahpahaman terjadi apabila ada ketersinggungan antar pemuda. Biasanya kasus ini terjadi pada saat hiburan malam atau di tempat-tempat keramaian lainnya. Kesalahpahaman dapat mengakibatkan penganiayaan dan memicu adanya bentrok warga antar lorong.

c. Aksi Kekerasan yang Direncanakan

Seringkali terjadi aksi kekerasan yang direncanakan oleh pihak-pihak yang bertikai. Aksi ini biasanya diawali saling menghubungi lewat *handphone* (HP). Misalnya pemuda dari Lorong Wapunto menghubungi pemuda dari Lorong Palangga melalui SMS dengan kata-kata menyepelkan atau menganggap remeh. Selanjutnya, pemuda dari Lorong Palangga yang merespon secara negative SMS tersebut dan secara spontanitas menghubungi rekan-rekan mereka untuk melakukan perlawanan. Dalam kasus seperti ini, isu yang dikembangkan adalah bahwa mereka telah direndahkan oleh pemuda dari Wapunto.

Aksi kekerasan dengan cara direncanakan ini biasanya dilakukan secara terbuka, sehingga akan tampak jelas siapa diantara dua kelompok yang berkonflik tersebut dianggap terhebat. Aksi kekerasan terjadi juga kerap terjadi dengan cara mendatangi rumah warga yang telah diketahui bahwa rumah tersebut terdapat musuh mereka

Dalam konteks kasus seperti ini biasanya terdapat mata-mata yang mengincar musuhnya. Misalnya, kejadian di Desa Banggai, dalam sebuah rumah yang kebetulan terdapat 2 orang pemuda dari Palangga sedang mengkonsumsi minum-minuman keras, tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang dengan mengendarai sepeda motor yang merupakan pemuda Wapunto. Dalam kejadian ini pemuda dari Wapunto

melontarkan kata-kata yang tidak sopan kepada pemuda yang ada di dalam rumah, karena terpancing dengan kalimat-kalimat yang tidak enak didengar akhirnya terjadilah perkelahian yang mengakibatkan jatuhnya korban dari pemuda Palangga.

2. Intensitas Kejadian Konflik

Konflik antar komunitas yang terjadi di Kabupaten Muna antara tahun 2011 s/d 2013 telah meninggalkan duka yang mendalam. Konflik ini bukan saja memakan harta benda tetapi juga menelan korban jiwa. Selain itu, konflik ini menimbulkan kepanikan dan ketakutan warga yang juga berimbas pada terganggunya seluruh aktivitas masyarakat setempat, seperti: 1) roda perekonomian hanya berjalan pada siang hari; 2) hubungan sosial, khususnya hubungan kekerabatan antara keluarga yang satu dan lainnya di lokasi yang bertikai tidak berjalan sebagaimana biasanya.

Konflik antar komunitas pada masa itu sering terjadi, bahkan dalam hitungan jam, karena pihak-pihak yang bertikai saling berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, wilayah kejadian juga berada dalam lingkup Kota Raha sebagai ibu kota Kabupaten Muna. Misalnya, Lorong Empang Kelurahan Raha 1 dan Kelurahan Palangga, kedua Lokasi ini berbatasan langsung sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk menjangkau lokasi tersebut. Selanjutnya, konflik Kelurahan Palangga dengan Kelurahan Wapunto yang juga berbatasan langsung sehingga sangat muda untuk memobilisasi massa saat terjadi tawuran atau perkelahian. Begitu pula dengan Lorong Rambutuan dengan Lorong Pendidikan (PK). Kedua lokasi ini berbatasan langsung bahkan untuk menghindari konflik ditengah jalan dibuat beton yang tingginya sekitar 3 meter.

Selama kurun waktu 2 tahun yaitu 2011-2012 kasus konflik yang berhasil ditangani polisi di Kabupaten Muna sebanyak 97 kasus dan sampai bulan Agustus 2013

hanya terdapat 1 kasus konflik, sementara konflik lainnya tidak tercatat karena kasus-kasus tersebut tidak dilaporkan secara resmi pada pihak kepolisian.

3. Model Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan Katobu

Dalam kehidupan umat manusia tidak dapat dipisahkan dengan konflik. Selama manusia hidup selama itu pula konflik tetap ada. Berdasarkan jenisnya konflik terdiri atas konflik antar individu (*individual conflict*), dan konflik antar kelompok (*collective conflict*). Konflik antar individu (*individual conflict*) adalah suatu jenis konflik yang hanya melibatkan dua pihak secara langsung baik itu individu (manusia) maupun negara. Sedangkan konflik antar kelompok (*collective conflict*) adalah suatu jenis konflik dimana pihak-pihak yang terlibat didalamnya bersifat kolektif dalam artian pihak yang terlibat dalam konflik jumlah pelakunya lebih dari satu menghadapi pihak lain yang bersifat kolektif pula.

Konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna tergolong dalam jenis konflik antar kelompok (*collective conflict*), karena melibatkan kelompok, komunitas warga yang berasal dari lokasi "lorong" yang berbeda dan saling menyerang satu sama lainnya. Berdasarkan bentuknya, konflik yang terjadi di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna adalah termasuk dalam bentuk *actual conflict*. Bentuk konflik seperti ini dimana para pihak yang berkonflik telah terlibat dalam bentrokan secara fisik, terjadi korban harta bahkan korban jiwa. Berdasarkan kondisi di atas, maka dipandang perlu dilakukan penanganan konflik di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk menangani konflik sosial di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Keterampilan Pemuda

Masyarakat dapat dikatakan berkembang atau maju apabila masyarakatnya telah memiliki keterampilan yang baik. Dengan keterampilan yang dimiliki dapat menciptakan lapangan kerja tanpa harus menggantungkan diri pihak lain. Salah satu kelemahan masyarakat selama ini adalah sifat ketergantungan yang dimiliki sangat tinggi. Untuk itu, dengan keterampilan yang memadai maka dapat berkarya sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Misalnya, mempunyai keterampilan membuat souvenir, keterampilan menjahit, dan lain sebagainya.

Demikian pula yang ditemukan di kalangan masyarakat, khususnya kaum muda di Kecamatan Katobu, mereka tidak memiliki keterampilan khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk berkarya dan beraktualisasi diri dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan minimnya keterampilan yang dimiliki, maka para pemuda mencari jalan lain untuk mengaktualisasikan dirinya dalam lingkungan masyarakat melalui kegiatan berkelompok dan mengkonsumsi minuman keras. Dalam banyak kasus di wilayah ini, kondisi yang demikian lebih banyak membawa dampak negatif. Karena berdasarkan penelitian ini ada relasi positif antara maraknya aktivitas konsumsi minuman keras dengan meningkatkan kriminalitas yang pada akhirnya menciptakan ketidaknyamanan di masyarakat.

Kelompok-kelompok pemuda yang tidak memiliki pekerjaan cenderung menggolongkan diri dan melakukan kegiatan-kegiatan negatif, seperti mengkonsumsi minuman keras, memalak setiap warga yang lewat disekitar mereka, yang selanjutnya berujung pada perkelahian, maupun aksi kekerasan lainnya.

Fenomena seperti ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah setempat. Dengan kata lain bahwa pemerintah setempat harus mampu melihat adanya kesenjangan di masyarakat, karena seyogyanya

pemuda merupakan penggerak pembangunan di suatu daerah. Apabila pemuda suatu daerah tidak memiliki keterampilan yang baik, maka mereka tidak dapat berkarya. Apabila tidak dapat berkarya maka dapat menjadi beban pembangunan. Karena pelaksanaan pembangunan membutuhkan orang-orang yang terampil untuk mensukseskannya. Bukan kuantitas manusia yang tidak mempunyai kualitas. Karena hal ini mempunyai hubungan kolerasi antara kualitas sumber daya manusia dan pembangunan yang berkualitas.

Salah satu kelemahan pemerintah daerah Kabupaten Muna adalah bahwa selama ini hanya fokus pada pembangunan fisik dan kurang memperhatikan pembangunan sumberdaya manusia. Perlu diketahui bahwa antara pembangunan fisik dengan pembangunan sumber daya manusia harus seiring dan sejalan, karena apabila salah satunya tidak berjalan maka pelaksanaan pembangunan akan pincang. Justru yang ada adalah dampak dari tidak adanya program peningkatan sumberdaya manusia, maka manusianya dibiarkan dalam kebodohan dan ketidakberdayaan.

Bagaimanapun hebatnya suatu pembangunan dirancang tetapi tanpa didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas maka pembangunan tersebut akan sia-sia. Justru pembangunan monumental tersebut dapat dirusak oleh manusianya. Hal tersebut dapat terjadi karena manusianya tidak memahami dengan baik fungsi pembangunan tersebut. Tetapi yang lebih fatal lagi di Kabupaten Muna adalah bahwa infrastruktur yang telah dibangun justru dirusak oleh manusia yang ada di sekitarnya.

2. Pembukaan Lapangan Kerja Baru

Salah satu penyebab banyaknya pengangguran di Kabupaten Muna adalah minimnya lapangan kerja. Dalam kondisi seperti ini, maka Kabupaten Muna rentan akan mengalami kendala ekonomi dan dapat pula menimbulkan kerawanan sosial.

Hal tersebut berelasi dengan semakin tingginya angka pengangguran di Kecamatan Katobu serta meningkatnya aksi yang terjadi hampir disemua tempat di wilayah Kecamatan Katobu. Hal Ini merupakan penyakit sosial yang perlu ditangani secara serius.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa berbagai pekerjaan yang digeluti oleh pemuda di Kecamatan Katobu rata-rata berpenghasilan sangat rendah, seperti tukang ojek, buruh pelabuhan, menjual makanan, tukang pikul di pasar, dan buruh toko. Jenis pekerjaan tersebut dilakukan secara serabutan dengan tingkat penghasilan yang tidak menentu pula. Salah satu gambaran pekerjaan yang digeluti oleh pemuda di Kecamatan Katobu adalah buruh pelabuhan. Aktivitas yang mereka lakukan mulai efektif (menghasilkan uang) ketika ada kapal cepat yang sandar di Dermaga Nusantara Raha. Kapal tersebut hanya singgah sebentar saja. Oleh karena itu, buruh pelabuhan harus bergerak cepat dan cekatan, berdesak-desakkan dengan penumpang lainnya untuk mencari barang penumpang yang ingin barangnya dipikul oleh buruh pelabuhan.

Lain halnya jika ada perusahaan atau pabrik di tempat itu, maka mereka dapat terserap untuk menjadi tenaga kerja tetap. Jika semua itu mampu disediakan, maka kondisi di Kecamatan Katobu akan berbeda dari yang sekarang. Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Muna mengatakan bahwa untuk mendatangkan investor merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah tetapi juga pelaku bisnis harus ambil bagian dalam hal ini. Oleh karena itu, diperlukan promosi mengenai potensi daerah agar para investor tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Muna.

3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Studi Lanjut

Permasalahan utama di wilayah konflik minimnya kualitas sumber daya manusia. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sebahagian besar pemuda yang ber-

konflik di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna adalah putus sekolah. Mereka hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Umum (SMU) dan bahkan ada pemuda yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD).

Kondisi inilah yang memperparah konflik di wilayah perkotaan di Kabupaten Muna. Hal ini diakui sendiri oleh ketua Bappeda Kabupaten Muna bahwa urusan pendidikan memang yang paling krusial. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi lingkungan yang tidak kondusif. Sehingga mereka cenderung berpikiran pragmatis. Sayangnya, jika para pemuda di Kecamatan Katobu mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, maka mereka akan semua tindakannya akan dilandasi oleh pikiran yang rasional, termasuk didalamnya berpikir manfaat, untung dan rugi dari setiap tindakan mereka. Namun karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang mampu mereka peroleh di bangku sekolah, maka mereka tidak dapat berpikir jauh ke masa depan.

Kondisi tersebut harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Muna. Pemda setempat perlu memikirkan keberlanjutan pendidikan kalangan pemuda putus sekolah di Kecamatan Katobu, termasuk studi lanjut bagi mereka yang telah lulus jenjang pendidikan di tingkat SMP dan SMA. Banyak jalan untuk mewujudkan hal itu, pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pendidikan tentunya dapat menganggarkan program pendidikan lanjut bagi generasi muda melalui alokasi 20% dana pendidikan yang sesungguhnya sangat besar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut, jika dioptimalkan oleh penggunaannya.

Permasalahan lain yang ada di Kabupaten Muna adalah semakin banyak orang yang meninggalkan daerah ini. Banyak orang Muna yang memiliki kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang baik, tetapi mereka sebahagian besar memilih untuk

tinggal di daerah orang (perantauan). Mereka telah banyak yang berhasil, bahkan telah banyak dari mereka yang sukses dan membangun daerah orang. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak pulang untuk membangun daerahnya sendiri?. Pertanyaan tersebut cukup menggelitik di telinga kita. Memang aneh, melihat daerah sendiri dilanda konflik sementara mereka tinggal diam saja. Apakah mereka tidak punya tempat di sana. Atau mereka ada sentimen budaya sehingga tidak mau pulang membangun kampung halamannya. Hal ini merupakan permasalahan serius. Karena jika hal ini dibiarkan terus-menerus maka kedepannya Kabupaten Muna banyak kehilangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan sebuah pemikiran untuk menata Kabupaten Muna agar menjadi Muna yang maju dan sejahtera jauh dari konflik dan ketidaknyamanan sosial. Pemikiran dan sifat iri, dengki, sakit hati, balas dendam perlu dihilangkan. Hal yang perlu dikedepankan adalah sifat saling memaafkan satu sama lain. Hal lain yang perlu dikedepankan adalah bagaimana pembangunan di wilayah perkotaan dapat berjalan dan sukses. Oleh karena itu, harus dibangun kebersamaan agar hal tersebut dapat tercapai. Menurut Lurah Raha I bahwa sebenarnya di wilayah ini banyak yang orang yang memiliki sifat iri jika melihat jika orang lain berkembang. Mereka tidak mau melihat orang lain mempunyai harta yang berlebihan. Sifat inilah yang seharusnya dihilangkan. Karena kelihatannya selama ini jika ada orang yang sukses diusahakan agar orang tersebut merosot jatuh miskin. Hal ini jugalah penyebabnya mengapa orang yang cerdas yang mempunyai pendidikan yang tinggi tidak mau kembali ke kampung halamannya untuk membangun daerahnya.

Seharusnya perlu upaya konkrit dan komitmen dari pihak pemerintah daerah agar rasa iri, dengki dan sakit hati ini dapat dikurangi bahkan dihilangkan dari masyarakat

Muna. Agar dapat terjadi keamanan dan Kenyamanan hidup antar sesama masyarakat Muna pada khususnya dan dengan orang luar pada umumnya.

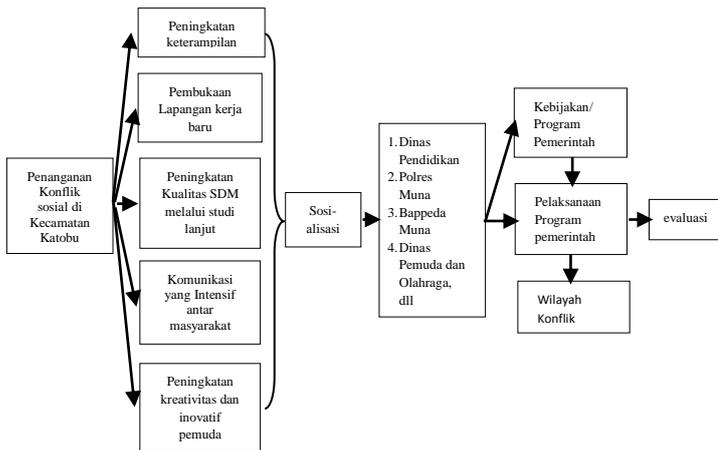
4. Komunikasi yang Intensif antar Masyarakat

Komunikasi intensif adalah jenis komunikasi yang dilakukan secara khusus, dengan penekanan dan fokus kepada masalah atau isu tertentu yang memerlukan pemahaman yang harus benar-benar terinci dan akurat. Sering sekali komunikasi intensif harus dilakukan secara cepat, tepat dan segera karena memerlukan tindak lanjut yang harus cepat, tepat dan segera pula. Sebagai contoh, komunikasi intensif harus dilaksanakan jika sedang menghadapi suatu konflik sosial. Pada waktu berkonflik, komunikasi intensif harus sejalan dengan komunikasi resiko.

Komunikasi resiko adalah informasi-informasi yang dikomunikasikan secara intensif dalam rangka meminimalisir resiko yang mungkin terjadi, misalnya akibat dampak dari konflik. Diperlukan Persiapan dan perencanaan yang lebih khusus pula jika kita harus melakukan komunikasi intensif. Biasanya, untuk melakukan komunikasi intensif akan lebih berperan orang-orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai isu dan masalah yang ingin dikomunikasikan.

Salah satu penyebab terjadinya konflik di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yang terjadi beberapa tahun yang silam adalah karena kurangnya komunikasi yang intensif dari pihak yang berwenang. Letusan demi letusan konflik yang terjadi menunjukkan proses komunikasi antar berbagai pihak di Kabupaten Muna pihak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal sesungguhnya konflik dapat diredam, diminimalisir bahkan dihilangkan, salah satunya melalui komunikasi yang intensif dari berbagai pihak tersebut.

Selain itu, perlu pula di intensifkan kegiatan bersama dalam lingkungan masyarakat di Kecamatan Katobu yang memungkinkan terjalinnya relasi persahabatan antar pemuda antar lorong bahkan antar masyarakat secara luas di Kabupaten Muna. Dari hasil wawancara, menunjukkan bahwa kalangan pemuda di Katobu tidak pernah terlibat dalam kegiatan bersama di lingkungan mereka, seperti kegiatan olahraga maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Mereka cenderung hanya mengelompokkan diri diantara sesama mereka. Oleh karena itu, dalam rangka meredam bahkan mencegah terjadinya gesekan antar kelompok masyarakat di Kecamatan Katobu, maka perlu adanya upaya dari pihak-pihak terkait untuk mempertemukan para pemuda dalam satu kegiatan positif secara rutin, baik melalui kegiatan olahraga diwilayah mereka, maupun kegiatan sosial di lingkungan mereka. Dengan demikian, sekat-sekat diantara pemuda dapat dihilangkan.



Bagan 1. Model Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna

D. PENUTUP

Konflik yang menimpah masyarakat Muna khususnya di wilayah Kecamatan Katobu selama kurun waktu 2001-2012 telah merusak sendi-sendi kehidupan sosial budaya di wilayah ini. Konflik ini telah

mengakibatkan trauma bagi masyarakat di Kecamatan Katobu masyarakat baik fisiologi, psikologi maupun sosial budaya.

Konflik yang terjadi di Kecamatan Katobu secara umum disebabkan beberapa hal, yakni: 1) konsumsi minuman keras yang sering dilakukan oleh kalangan pemuda di Kecamatan Katobu; 2) kesalahpahaman antar pemuda yang kerap memicu kekerasan missal; 3) adanya aksi kekerasan yang direncanakan oleh oknum kelompok pemuda yang menyulut emosi kelompok pemuda dari komunitas lainnya.

Adapun model penanganan konflik sosial di Kecamatan Katobu yang dapat ditempuh melalui beberapa upaya, antara lain: 1) pemberdayaan kalangan pemuda melalui peningkatan keterampilan; 2) pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Kecamatan Katobu; 3) mendorong anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan sampai kejenjang yang tinggi, serta 4) perlu adanya komunikasi intensif antar pemuda di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna

DAFTAR PUSTAKA

- Bebbington, A. 1997. Social Capital and Rural Intensification: Local Organizations and Islands of Sustainability in the Rural Andes, dalam *Geographic Journal*, Vol. 163/2, pp. 189-197.
- Dharmawan, A. H. 2006. Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat). Materi Seminar PERAGI Pontianak 10-11 Januari 2006.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, The British Council.

- Oberschall, A. 1978. Theories of Social Conflict, dalam *Annual Review of Sociology Vol. 4*, pp. 291-315.
- Luckham, R. 1998. *Democratic Institutions and Politics in Context of Inequality, Poverty, and Conflict*. IDS Working Paper No. 104.
- Miall, H, Oliver Ramsbotham, & Tom Woodhouse. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Terj. Tri Budi Satrio. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern, Ed. Ke 6*. Jakarta: Prenada Media.
- Suwartapradja, O. S. 2005. *Konflik Sosial: Kasus Pada Pembangunan Bendungan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang Jawa Barat*. Makalah Disajikan pada SKIM IX UNPAD-UKM, 10 – 12 Mei 2005. Bandung.
- Taufik, A Tuhana. 2000. *Konflik Maluku*. Yogyakarta: Gama Global Media.
- Vredenburg, J. 1978. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.

Aturan Perundang-Undangan

UU Momor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.